

PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM PADA KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI SMA NEGERI 5 JENEPONTO

Andi Aco Agus¹, Irsyad Dahri², Sriwahyuni³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹a.acoagus670@gmail.com, ²cha4400@yahoo.com,

³sriwahyuniest.99@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine (1) Stages of Implementation of Minimum Competency Assessment at SMA Negeri 5 Jeneponto (2) Obstacles encountered in the implementation of the Minimum Competency Assessment at SMA Negeri 5 Jeneponto. The approach used in this study is a qualitative approach using a descriptive type of research with data sources from school principals, teachers, and students (AKM participants). The data collection procedures used are observation (observation), interviews and documentation. The stages of research carried out are planning, implementation and writing stages of research results for drawing conclusions. The results of this study indicate that (1) The stages of implementing the Minimum Competency Assessment at SMA Negeri 5 Jeneponto are the preparation stage such as facilities (computer units, internet/wifi access, AKM guide books), holding workshops (training) for teachers, procurement proctor, conduct simulations and guidance for AKM participants. At the stage of the implementation process, there is supervision. As well as the evaluation and follow-up stages by getting used to reading before the lesson starts in order to improve students' reading literacy. (2) The obstacles faced in implementing the Minimum Competency Assessment at SMA Negeri 5 Jeneponto are the lack of teacher understanding, inadequate internet access, not all AKM participants can operate a computer, as well as the lack of interest of students in reading questions. As for the efforts made, namely, providing workshops (training) for teachers, dividing the implementation sessions for AKM participants, conducting simulations and supervision, and providing guidance or tutoring.*

Keywords: Implementation of Minimum Competency Assessment (AKM).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tahap-tahap Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan sumber data dari Kepala sekolah, Guru, dan siswa (Peserta AKM). Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan tahap penulisan hasil penelitian untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tahap-tahap Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto yaitu tahap persiapan seperti sarana (unit komputer, akses internet/wifi, buku panduan AKM), mengadakan workshop (pelatihan) bagi guru, pengadaan proktor, mengadakan simulasi dan bimbingan pada peserta AKM. Pada tahap proses pelaksanaan berlangsung ada pengawasan. Serta tahap evaluasi dan tindak lanjut dengan membiasakan membaca sebelum pelajaran dimulai guna meningkatkan literasi membaca peserta didik. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto yaitu kurangnya pemahaman guru, akses internet kurang memadai, tidak semua peserta AKM bisa mengoperasikan komputer, serta kurangnya minat peserta didik membaca soal. Adapun upaya yang dilakukan yaitu, memberikan workshop (pelatihan) bagi guru, membagi sesi pelaksanaan peserta AKM, melakukan simulasi dan pengawasan, serta memberikan bimbingan atau les.

Kata Kunci: Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan tetap menjadi bagian penting dalam kemajuan suatu negara. Sebagaimana yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era revolusi 4.0 yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan”. Pasal tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya.

Memasuki era sekarang ini, pendidikan di negara kita selalu mengalami perbaikan bahkan perubahan sebagaimana kebijakan baru yang dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia oleh bapak Nadiem Makarim dalam Kabinet Indonesia Maju dengan gebrakan program merdeka belajar. Kebijakan merdeka belajar diluncurkan dalam koridor upaya untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Merdeka belajar yang merupakan upaya untuk menggebrak sistem pembelajaran di Indonesia, salah satunya yang dinyatakan dalam Permendikbudristek No 17 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (2) tentang Asesmen Nasional bahwa hasil belajar diukur melalui asesmen kompetensi minimum (AKM). Merdeka belajar ini merupakan konsep yang menarik dan juga menjadi tantangan bersama.

Merdeka belajar memiliki makna kebebasan berinovasi, kreatif serta belajar dengan mandiri bagi unit pendidikan, baik guru maupun peserta didik, namun pada kenyataannya di daerah kabupaten Jeneponto, sudah banyak sekolah yang diberikan sosialisasi dari dinas kabupaten dalam hal ini pengawas sekolah terkait kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Munculnya kebijakan merdeka belajar ini mendapat tanggapan beragam dari guru terkait pemberlakuan kebijakan merdeka belajar yang dianggap masih sulit, khususnya masih minim pemahaman guru terkait hasil belajar yang diukur melalui asesmen kompetensi minimum karena tergolong baru. Peserta didik diberi kebebasan berekspresi namun kenyataannya dalam proses pembelajaran dengan memberi penjelasan atau memaparkan materi secara langsung saja di sekolah, peserta didik masih kurang paham dengan materi yang diajarkan, artinya peserta didik masih belum bisa terlepas dengan proses pembelajaran tatap muka apalagi diberi kebebasan dalam bertindak yang bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan karena terlepasnya pengawasan dari guru. Setiap sekolah juga tidak mempunyai fasilitas yang cukup untuk disediakan kepada setiap peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih

dalam melalui penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum Pada Kebijakan Merdeka Belajar di SMA Negeri 5 Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian-penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dengan topik penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif, dan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan informasi yang bermanfaat, sistematis, teliti, dan mendalam. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 5 Jeneponto. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan dokumentasi dengan menggunakan instrument penelitian panduan atau pedoman wawancara, serta menggunakan alat bantu penelitian seperti kamera, alat perekam, buku catatan dan lainnya. Dan dengan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto

Asesmen kompetensi minimum bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar dalam mengembangkan kapasitas mutu Pendidikan tentang literasi membaca dan numerasi matematika untuk memperbaiki proses pembelajaran di satuan pendidikan begitupun di SMA Negeri 5 Jeneponto sebagaimana asesmen kompetensi minimum telah diterapkan. Adapun beberapa tahapan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum terdiri dari persiapan, proses pelaksanaan dan evaluasi yaitu:

a. Persiapan

Persiapan merupakan langkah awal dalam proses pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Persiapan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum

sangat penting demi kelancaran satuan Pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum berlangsung. Persiapan pelaksanaan Asesmen Kompetensi minimum disiapkan dari jauh sebelum jadwal pelaksanaan dimulai. Persiapan berupa workshop (pelatihan) bagi guru yang dipandu langsung oleh pengawas sekolah dalam hal ini perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, mempersiapkan proktor dan akun sekolah, melakukan bimbingan kepada peserta didik (les), pengadaan sarana (komputer, akses internet/wifi, buku panduan AKM), prasarana (lap komputer), pengadaan pengawas dan simulasi bagi peserta didik.

b. Proses Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum

Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto pertama kali dilaksanakan karena asesmen kompetensi minimum merupakan kebijakan baru pengganti ujian nasional dalam pemetaan tingkat mutu satuan Pendidikan untuk menjadi acuan sekolah dengan mengukur literasi dan numerasi serta mengetahui transfer ilmu dari guru ke peserta didik. Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto tidak akan berlangsung tanpa adanya peserta yang mengikuti, jadwal pelaksanaan, serta teknisi pelaksanaan, dan pengawas. Oleh karena itu harus ada persiapan yang lebih agar berlangsung dengan aman tanpa adanya kendala Dalam proses pelaksanaan Asesmen Kompetensi minimum dilaksanakan selama 2 hari. Dalam sehari dibagi dua sesi dengan jumlah total peserta AKM 45 orang, jadi dalam satu sesi peserta yang mengikuti 20-25 orang persesi. Pelaksanaannya selama dua hari diawasi oleh pengawas sekolah dan dihandel oleh Proktor sekolah. Pelaksanaan ujian Asesmen Kompetensi Minimum dilakukan dengan berbasis komputer dengan bentuk soal pilihan ganda, essay dan menjodohkan.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dan tindak lanjut merupakan hasil yang ingin dicapai untuk mengetahui keberhasilan satuan pendidikan dilihat dari hasil survey pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum bukan penentu lulus atau tidaknya peserta didik melainkan suatu penilaian untuk memperbaiki tingkat mutu pendidikan sehingga dari hasil tersebut bisa dilakukan perbaikan jika masih belum optimal sesuai yang diinginkan. Evaluasi pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto belum ada hasil yang diketahui untuk memperbaiki strategi pembelajarannya, namun karena hasil belum diketahui sehingga pihak sekolah masih belum mengetahui bagaimana tindak lanjut untuk AKM yang akan dilaksanakan tahun berikutnya, tetapi para guru tetap membiasakan membaca di kelas sebelum proses pembelajaran dimulai.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum Di SMA Negeri 5 Jeneponto

Kendala merupakan hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto. Berikut beberapa kendala dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum Di SMA Negeri 5 Jeneponto

a. Kurangnya Pemahaman Guru

Asesmen Kompetensi Minimum merupakan kebijakan baru, sekolah melaksanakan pertama kali pengganti ujian Nasional, sehingga pemahaman guru terkait pelaksanaan AKM masih kurang, selain itu dalam pengadaan workshop tidak semua guru mengikutinya jadi hanya beberapa guru yang paham terkait Asesmen Kompetensi Minimum.

b. Akses internet yang kurang memadai

Akses internet yang kurang memadai menjadi penghambat dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum. Jaringan internet yang kurang memadai sehingga peserta didik merasa panik dan tegang

karena laman website tiba-tiba keluar dan soalnya tidak lengkap terkadang yang dipertanyakan ada soal dalam bentuk gambar tetapi gambarnya tidak muncul.

c. Tidak semua Peserta AKM bisa mengoperasikan Komputer.

Komputer merupakan sarana yang paling penting dalam pelaksanaan AKM karena pelaksanaannya berbasis komputer, namun masih banyak peserta didik yang tidak lancar mengoperasikan komputer menjadi penghambat dalam kelancaran pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto.

Peserta yang mengikuti ujian Asesmen Kompetensi minimum banyak yang tidak bisa mengoperasikan komputer karena pemahamannya yang kurang, tidak semua peserta AKM juga memiliki laptop di rumahnya, selain itu tidak ada pelajaran yang memfokuskan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi.

d. Kurangnya Minat peserta didik Membaca Soal.

Minat membaca peserta didik dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto masih kurang, juga menjadi penghambat pelaksanaannya dikarenakan soal yang disajikan terlalu Panjang sehingga peserta AKM mengeluh.

3. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jeneponto

Upaya merupakan usaha dalam mengarahkan tenaga maupun pikiran untuk mencapai tujuan, begitupun dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan AKM di SMA Negeri 5 Jeneponto yaitu:

- Mengadakan Workshop (pelatihan) Bagi Guru
- Membagi sesi pelaksanaan peserta Asesmen Kompetensi Minimum
- Mengadakan simulasi dan pengawasan
- Memberikan bimbingan (les) pada Peserta Asesmen Kompetensi Minimum

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap-tahap pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jenepono yaitu tahap persiapan seperti sarana (unit komputer, akses internet/wifi, buku panduan AKM), mengadakan workshop (pelatihan) bagi guru, pengadaan proktor, mengadakan simulasi dan bimbingan pada peserta AKM. Pada tahap proses pelaksanaan berlangsung ada pengawasan. Serta tahap evaluasi dan tindak lanjut dengan membiasakan membaca sebelum mata pelajaran dimulai guna meningkatkan literasi membaca peserta didik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum di SMA Negeri 5 Jenepono yaitu (1) kurangnya pemahaman guru, (2) akses internet kurang memadai, (3) tidak semua peserta AKM bisa mengoperasikan komputer, (4) kurangnya minat peserta didik membaca soal. Adapun upaya yang dilakukan yaitu (1) memberikan *workshop* (pelatihan) bagi guru, (2) membagi sesi pelaksanaan peserta AKM, (3) melakukan simulasi dan pengawasan, (4) memberikan bimbingan pada peserta AKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. 2020. *Panduan Skripsi FIS-H. Makassar*. UNM
- Najela Shihab & Komunitas Guru Belajar. 2017. *Merdeka belajar di Ruang Kelas*. Literati. Tangerang Selatan.
- Modul AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramlawati DJ. 2013. *Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di Kelurahan Bolandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Hanafi Hilmiah Almanda. 2020. *Pendidikan Seni Musik sebagai Implementasi Konsep Merdeka belajar*. Seminar Nasional Seni Desain. 2(1). 27-32.
- Meylan Saleh. 2020. *Merdeka belajar di Tengah Pandemi Covid-19*. Prosiding Seminar Nasional Hardiknas 1. Vol 1. 51-56.
- Kemendikbud dan Mohammad Tohir. 2019. *Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*. OSF Preprints. 2(1).
- Muhammad Yamin dan Syahrir. 2020. *Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran)*. Jurnal ilmiah Mandala Education 6(1).
- Siti Baro'ah. 2020. *Kebijakan Merdeka Belajar sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Tawadhu 4(1). 1063-1073.
- Tju Meriana dan Erni Murniati. 2021. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2). 111
- Permendikbudristek No 17 Tahun 2021 Ayat (2) Tentang Asesmen Kompetensi Minimum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Admin Rukim." Merdeka Belajar Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 2019/2020 siaran Pers". 28 Desember 2021. "Merdeka Belajar" Empat Pokok Kebijakan Pendidikan 2019/2020 (rukim.id)
- Epin Supin."10 Manfaat Program Merdeka Belajar yang Didapat oleh Guru". 31 Desember 2021. <http://www.google.com/amp/s/blog.kerjacita.id/10-manfaat-program-merdeka-belajar-y>